

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI  
PEMAKNAAN, DAN KASUS DI LAPANGAN**

***(EMPOWERMENT OF FARMER COMMUNITY  
MEANINGS, AND FIELD CASE)***

**Indardi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Agribisnis,  
Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul  
E-mail: indardiagri@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*The local autonomy has changes the development strategy was centered to decentralization by public empowerment. The empowerment of farmer community believed as the most suitable for agriculture sector. The problem is how far the meanings of public empowerment understand by concerned parties, especially the government and farmer community. It will influence to how the empowerment proceed. The consequence of social empowerment is led to the high performance of the farmer, thus social interaction more intensive. The review aimed to disclosure how the meanings in empowerment of farmer by concept and field case. This study with one sample case method (Yin RK, 2005). The conclusion is that farmer community understands in partially and do not meet to the actual meaning. It is suggested that there is must be a socialization to makes agreement in perception to the meaning of farmer empowerment.*

*Keywords: Empowerment of farmer community, meanings*

**ABSTRAK**

Otonomi Daerah telah merubah strategi pembangunan yang semula serba terpusat menjadi terdesentralisasi dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tani diyakini sebagai pendekatan yang paling sesuai di sector pertanian. Masalahnya adalah sejauhmana pemaknaan pemberdayaan masyarakat tani ini dimaknai oleh pihak-pihak yang terlibat, khususnya pemerintah dan masyarakat petani. Hal ini akan berpengaruh terhadap bagaimana kegiatan pemberdayaan masyarakat tani tersebut dilakukan. Konsekuensi pendekatan pemberdayaan masyarakat tani menuntut peran serta petani yang tinggi sehingga interaksi social di antara mereka lebih intensif. Kajian ini bermaksud mengungkap bagaimana pemaknaan pemberdayaan masyarakat tani dari segi konsep dan kasus di lapangan . Kajian dilakukan dengan metode kasus tunggal (Yin RK, 2005). Sebagai kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat tani dimaknai secara parsial, dan belum menyentuh makna yang sesungguhnya. Disarankan ada sosialisasi agar ada persamaan persepsi terhadap makna pemberdayaan masyarakat tani.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat tani, pemaknaan

## I. PENDAHULUAN

Indonesia dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami beberapa masa pemerintahan, mulai masa penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, serta masa reformasi dan Otonomi Daerah. Pada masa penjajahan semua kebijakan diorientasikan demi kepentingan penjajah, Orde Lama merupakan masa peralihan pemerintahan (masa penataan sistem pemerintahan) dan mencari bentuk sistem pemerintahan, sedangkan Orde Baru merupakan masa pemerintahan terpusat (sentralisasi) dalam berbagai bidang pembangunan. Pada era reformasi dilakukan penataan kembali sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan berkeadilan (menuju desentralisasi sistem pemerintahan). Melalui Otonomi Daerah secara tegas memberikan payung hukum dalam melakukan desentralisasi pemerintahan melalui Undang-Undang Otonomi Daerah, dengan pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah propinsi dan kabupaten/kota.

Isu-isu desentralisasi sebenarnya sudah muncul dan banyak dibicarakan terutama pada akhir-akhir masa Orde Baru, namun sifatnya sangat parsial dan tidak memberikan perbaikan yang berarti. Sejak tahun 2001 negara RI telah memasuki era Otonomi Daerah yang sudah dicanangkan sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan penjelasannya, UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme beserta penjelasannya (Anonim, 2003).

Otonomi daerah telah mengubah secara mendasar mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yang semula serba terpusat, kini ada pengaturan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Selengkapnya pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dalam PP Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. PP ini mengatur pembagian urusan meliputi 31 bidang, mulai bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil, kehutanan, dan sebagainya, tentu saja termasuk juga sektor pertanian. Sektor pertanian dalam PP no 38 Tahun 2007 tersebut menjadi satu bidang dengan ketahanan pangan, dengan nama "bidang pertanian dan ketahanan pangan".

Strategi pembangunan secara terpusat tidak lagi relevan. Di era otonomi daerah diyakini pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang paling sesuai. Pertanian sebagai salah satu sektor yang kegiatannya diotonomikan, menjadikan pemerintah daerah kabupaten memiliki tanggung jawab besar. Suatu masalah penting adalah bagaimana upaya pemerintah daerah memberdayakan masyarakat taninya. Keterlibatan berbagai pihak berkompeten semakin penting peranannya dalam upaya peningkatan SDM petani di Indonesia.

Keberhasilan masyarakat tani dalam pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh bagaimana unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalamnya memahami arti pemberdayaan masyarakat tani yang mereka jalani. Pemaknaan terhadap pemberdayaan masyarakat tani khususnya dari pihak pemerintah dan petani, akan mempengaruhi bagaimana program-program pemberdayaan masyarakat tani tersebut diselenggarakan. Pemberdayaan masyarakat tani yang menekankan pentingnya peran petani selaku subyek dan obyek, menuntut partisipasi yang tinggi darinya. Keterlibatan masyarakat petani dalam berbagai/semua level kegiatan memberikan konsekuensi adanya intensitas interaksi sosial yang tinggi di antara mereka. Dengan demikian pemaknaan pemberdayaan masyarakat tani yang dipahami oleh petani maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut akan menentukan bagaimana

berbagai kegiatan pemberdayaan di tingkat lapangan dilakukan. Terkait pentingnya masalah tersebut, tulisan ini ingin menguraikan tentang pemaknaan pemberdayaan masyarakat tani melalui penelitian studi kasus yang penulis lakukan.

Pemaknaan pemberdayaan masyarakat dapat ditelusuri dari berbagai konsep yang dikembangkan oleh para ahli. Pemberdayaan masyarakat tani menyangkut bagaimana partisipasi petani baik secara fisik, fikiran dan kesungguhannya dalam proses produksi pertanian mulai dari perencanaan, produksi sampai pemasaran produk dan menikmati hasil (pendapatan) usahanya; yang dikelola secara berkelompok (kelompok tani). Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa-sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal dengan aliran post-modernisme (Hikmat, 2006: 1). Selanjutnya dikatakan bahwa konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan (hal 3). Dalam bukunya: "Strategi Pemberdayaan Masyarakat" Hikmat antara lain membahas tentang pemberdayaan sebagai strategi pembangunan sosial (59-88), pemberdayaan sebagai strategi pembangunan berpusat pada rakyat (89-90), strategi pemberdayaan masyarakat berbasis sosial budaya lokal (137-170), dan teknik pemberdayaan masyarakat partisipatif (217-231).

Gagasan pemberdayaan berangkat dari realitas objektif yang merujuk pada kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumber daya masyarakat (Breton dalam Eko, 2004: 249). Masih dalam halaman yang sama Eko meyakini bahwa antara pembangunan (paradigma lama) dan pemberdayaan (paradigma baru) mempunyai cara pandang dan keyakinan yang berbeda. Intinya bahwa paradigma lama lebih berorientasi pada negara dan modal, sedangkan pada paradigma baru (pemberdayaan) lebih berfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif.

Suparjan dan Suyatno (2003: 42-43) mengungkapkan bahwa kegagalan pembangunan model pertumbuhan ekonomi dalam upaya pengentasan kemiskinan ataupun mewujudkan keberlanjutan lingkungan, mendorong lahirnya konsep pembangunan alternatif (pemberdayaan). Konsep ini menuntut adanya demokrasi, pertumbuhan ekonomi yang menjamin kepentingan rakyat banyak, kesamaan gender dan keadilan antar generasi. Selanjutnya dikatakan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua aspek yaitu *to give or authority to* dan *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain; sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan sebagai upaya memberi kemampuan/ keberdayaan.

Ginancar Kartasmita (1996) memandang bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan yang berakar kerakyatan. Pemberdayaan bertitik tolak dari pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Peningkatan yang dituju juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Sumodiningrat (2007:2-3) mengungkapkan bahwa keberhasilan ekonomi menyisakan berbagai masalah terutama pemerataan pembangunan dan hasilnya, termasuk di dalamnya besarnya kemiskinan, kesenjangan (ketidakadilan), dan pengangguran.

Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai suatu pendekatan "pembangunan berorientasi proses". Pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang

memanusiakan manusia, karena yang lebih penting bukan bagaimana hasilnya secara material, melainkan bagaimana prosesnya sehingga hasil tadi diperoleh; apakah sudah melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses yang menggambarkan pengakuan terhadap kapasitas masyarakat yang bersangkutan (Soetomo, 2006: 7). Pandangan ini mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh determinasi dan kesadaran. Partisipasi masyarakat yang diharapkan adalah partisipasi dalam arti yang sesungguhnya, yang oleh Kurnia (2004) disebutnya sebagai *self mobilisation* (mandiri). Diungkapkannya bahwa partisipasi pada tipe tersebut, masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi atau ditekan oleh pihak lain) untuk mengubah sistem atau nilai yang mereka miliki (2004: 33). Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mengembangkan kapasitas dirinya, dan masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat: *people-centered, participatory, empowering, and sustainable* (Chambers, 1995). Konsep pemberdayaan masyarakat tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi justru sebaliknya mencoba memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Salah satu masalah penting yang erat kaitannya dengan kemiskinan adalah *sindrom inertia* (lamban dan statis) sebagai akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia (Usman, 2003). Dalam hal ini pemerintah telah berusaha membenahi dan menyusun berbagai kebijakan pendidikan yang diharapkan dapat memacu pengembangan sumber daya manusia, diantaranya melalui pendidikan non formal kepada petani. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat tertentu agar mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangannya (Kartasasmita, 1996).

Sebenarnya dijumpai banyak pandangan tentang pengertian pemberdayaan masyarakat baik pada tataran konsep maupun kegiatannya di lapangan, mengingat bahwa pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh pihak manapun, baik pemerintah itu sendiri maupun unsur-unsur masyarakat lainnya, seperti perguruan tinggi, LSM, lembaga keagamaan (pesantren), organisasi-organisasi sosial, maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah, misalnya bisa dalam bentuk proyek pembangunan seperti P4K, P2KP, KUBE, IDT, JPS, dan sebagainya. Pemerintah juga melakukan pemberdayaan kelembagaan, khususnya untuk memberdayakan UKM dan koperasi. Di sini disebutnya sebagai Sistem Ekonomi Kerakyatan (SER). Menurut Prawirokusumo (2001:4) ciri-ciri yang akan dituju dalam SER adalah bahwa pembangunan untuk kepentingan rakyat, berbasis ekonomi domestik/ lokal (di kabupaten/kodua), kemandirian tinggi, kepercayaan diri, kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipatif, persaingan sehat, keterbukaan/demokrasi, pemerataan yang berkeadilan, serta didukung dengan industri yang berbasis sumber daya alam (*resources based industry*). Terakhir ada program UEP, PEKM, PNPM, dan sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat tani merupakan upaya peningkatan kualitas SDM petani dengan pengembangan wawasan dan pengetahuan, sikap progresif dan peningkatan ketrampilan dalam menggunakan teknologi pertanian. Untuk itu masyarakat tani hendaklah berpartisipasi secara maksimal dalam berbagai kegiatan pembangunan dari awal hingga akhir. Baik secara fisik dan utamanya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada berbagai kegiatannya di lapangan.

Kaitannya dalam upaya peningkatan kualitas SDM petani tersebut, membutuhkan suatu proses komunikasi yang baik, yakni yang disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya petani di daerah setempat; sehingga berbagai kegiatan komunikasi, seperti penyebaran informasi, sosialisasi, koordinasi, rapat-rapat, bentuk-bentuk pertemuan lain yang menyangkut proses pertukaran pesan selama kegiatan pemberdayaan masyarakat tani akan berjalan lebih efektif dan efisien. Berbagai kegiatan produktif yang ditumbuh-kembangkan di masyarakat bisa tetap *survive* dan *sustain* ketika proyek-proyek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan/ dimotori oleh lembaga-lembaga pelaksananya sudah berakhir.

Terkait dengan pemberdayaan petani, kemitraan yang bersinergi antara aparatur pemerintah daerah (khususnya dinas pertanian) dengan masyarakat tani dan pihak lain terkait sangat menentukan keberhasilan pembangunan di era otonomi daerah ini. Terkait dengan hal ini telah diungkapkan oleh Kaho (2005: 65-274) bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, yakni: 1) faktor manusia pelaksana, 2) faktor keuangan daerah, 3) faktor peralatan, dan 4) faktor organisasi dan manajemen.

Berdasarkan uraian tentang pemberdayaan tersebut, dan khususnya untuk masyarakat petani ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memaknai pemberdayaan masyarakat tani. Bahwa pihak-pihak utama yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat tani adalah pemerintah (seperti dinas pertanian, lembaga penyuluhan, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa) dan masyarakat tani yang tergabung dalam suatu kelompok tani (pengurus kelompok dan anggota). Pemaknaan pemberdayaan masyarakat tani setidaknya memiliki dua dimensi pemahaman. Pemberdayaan masyarakat tani memiliki makna teoritik, tentang bagaimana seharusnya terjadi sesuai dengan konsepnya. Juga dimensi praktis, yakni suatu praktek kegiatan pemberdayaan masyarakat di lapangan yang didasarkan pada teoritiknya dimana pemberdayaan masyarakat tani didefinisikan. Pemaknaan ini harus difahami secara utuh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tani tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Paradigma adalah suatu kepercayaan utama atau metafisika dari sistem berpikir basis dari ontologi, epistemologi, dan metodologi (Salim, 2006: 96-97). Dalam metodologi penelitian, paradigma merujuk pada seperangkat pranata kepercayaan bersama metode yang menyertainya (Alwasilah, 2003: 78-79). Ia mengungkapkan adanya dua paradigma besar, yakni paradigma naturalistik (kualitatif) dan paradigma konvensional (eksperimental). Hal yang sama diungkapkan juga oleh Creswell (2002:3) tentang adanya paradigma kuantitatif dan kualitatif. Kajian tentang Pemaknaan Petani Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat ini dilakukan dengan paradigma penelitian kualitatif-interpretif.

Hal mana dalam penelitian ini lebih bertujuan untuk memahami, merekonstruksi dan menggambarkan makna tindakan sosial melalui proses interpretasi dari pada melakukan kritik dan transformasi (paradigma kritis). Juga tidak dimaksudkan untuk menjelaskan, memprediksi, mengontrol atau menemukan hukum umum yang diperlukan bagi prediksi kontrol (paradigma eksperimental/positivistik). Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang makna pemberdayaan masyarakat yang mereka lakukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dengan metode studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial (Mulyana, 2001: 201). Penggunaan studi kasus digunakan apabila fenomena yang akan dikaji menyangkut pertanyaan *how* dan atau *why*. Yin (2005: 9) mengilustrasikan penggunaan

masing-masing pertanyaan penelitian tersebut dalam kajian yang berbeda. Studi kasus digunakan jika sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang diselidiki dan fokus penelitiannya pada fenomena kontemporer. Studi kasus untuk kasus tunggal diambil sebagai desain dalam kajian ini, terkait dengan beberapa keadaan:

- 1) Merupakan kasus penting, yang dapat mengetengahkan suatu kontribusi yang sangat signifikan kepada pembangunan pengetahuan dan teori.
- 2) Merupakan kasus yang ekstrim atau unik.
- 3) Merupakan kasus penyingkapan, situasi ini terjadi ketika peneliti memiliki akses terhadap suatu situasi yang semula tak memberi peluang kepada kajian ilmiah (Yin, 2005: 47-50).

Studi kasus digunakan dalam kerangka mendeskripsikan fenomena-fenomena (berupa kategori-kategori atau konsep-konsep) yang berkaitan, dan berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan (di wilayah penelitian) saat ini (era otonomi daerah), diarahkan untuk menemukan makna kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakkan petani jamur merang. Langkah penyelenggaraan penelitian dengan pendekatan studi kasus (untuk kasus tunggal) ini terutama mengacu pada apa yang disarankan oleh Yin (2005), mulai dari kegiatan persiapan pengumpulan data, pelaksanaan pengumpulan data, tahap analisis bukti studi kasus, sampai pada penulisan laporannya. Alasan digunakannya studi kasus bahwa keadaan permasalahan yang diangkat sesuai dengan kriteria yang diungkapkannya bahwa desain studi kasus tunggal cocok antara lain untuk beberapa keadaan berikut ini.

Pertama, kasus tunggal menyajikan kasus ekstrim atau unik. Sama halnya dengan usahatani jamur merang yang muncul pasca gempa di desa Argorejo. Dengan kreatifitasnya bisa membuat iklim mikro sehingga memenuhi syarat tumbuh jamur merang. Merupakan kasus pemberdayaan masyarakat tani melalui usahatani jamur merang yang unik yang pertama kali ada di Kabupaten Bantul. Baru pada akhir tahun 2010 muncul kelompok tani jamur merang yang lain di desa Triwidadi dan desa Argosari, yang belajar dari kelompok tani jamur merang Argorejo. Kajian komunikasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui usahatani jamur merang tersebut juga baru pertama kali ini dilakukan.

Rasional kedua studi kasus adalah kasus penyingkapan itu sendiri. Situasi ini muncul manakala peneliti mempunyai kesempatan untuk mengamati dan menganalisis suatu fenomena yang tak mengizinkan penelitian ilmiah dilakukan. Dalam kajian ini, peneliti mendapatkan kesempatan/izin langsung yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten Bantul dan kepala pemerintah setempat (Kepala Desa Argorejo) sehingga tidak memberi kesempatan bagi kelompok tani jamur merang untuk menolak keberadaan kajian ini demi alasan kepentingan ilmiah dan kemungkinan perbaikan kedepannya.

Subyek penelitian dalam kajian ini terutama ditujukan kepada petani anggota kelompok dalam proses produksi jamur merang yang terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tani di Desa Argorejo. Subyek penelitian diambil secara purposif, yakni informan yang dipandang memahami, mampu memberikan penjelasan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tani untuk melakukan kegiatan usahatani jamur merang, terkait dengan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Informasi yang dipaparkan merupakan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam pemberdayaan masyarakat tani, sebuah studi kasus di kelompok tani jamur merang Lestari Makmur di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemaknaan pemberdayaan petani yang terjadi dalam kelompok tani jamur merang

tersebut. Merupakan penelitian kualitatif, dengan metode penelitian studi kasus untuk kasus tunggal (Yin: 2005) dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sebagai informan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul, Kepala BIPP Bantul, Camat Sedayu, dan Kepala Desa Argorejo. Sedangkan informan petani terdiri dari pak Marjan, pak Suwitt, pak Mujiman, pak Bandi, pak Martoyo, pak Sastro, pak Jefri dan pak Mujiono yang semuanya anggota kelompok tani jamur merang Lestari Makmur Desa Argorejo. Data dikumpulkan dengan berbagai cara dengan memanfaatkan berbagai sumber bukti, yakni secara dokumentasi, wawancara, observasi langsung, rekaman arsip, maupun observasi partisipan.

Pada level pemerintah, masing-masing informan memberikan pemaknaan yang berbeda terhadap konsep pemberdayaan masyarakat. Hal ini terkait kebiasaannya dalam menghandel berbagai kegiatan yang menjadi bidang kerjanya. Juga menyangkut dengan tipe pekerjaannya sehari-hari, apakah lebih banyak berada di belakang meja atautkah lebih banyak kerja di lapangan. Sejauhmana keterlibatan informan yang bersangkutan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di lapangan akan mempengaruhi caranya berpikir dalam memaknai konsep pemberdayaan masyarakat. Secara garis besar ada dua tipe pemaknaan pemberdayaan masyarakat yang ditemukan, yakni pemaknaan yang cenderung bersifat konseptual dan pemaknaan pemberdayaan masyarakat yang cenderung bersifat praktis. Hal ini bisa dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 11. Pemaknaan Pemberdayaan Masyarakat oleh Pejabat Pemerintah

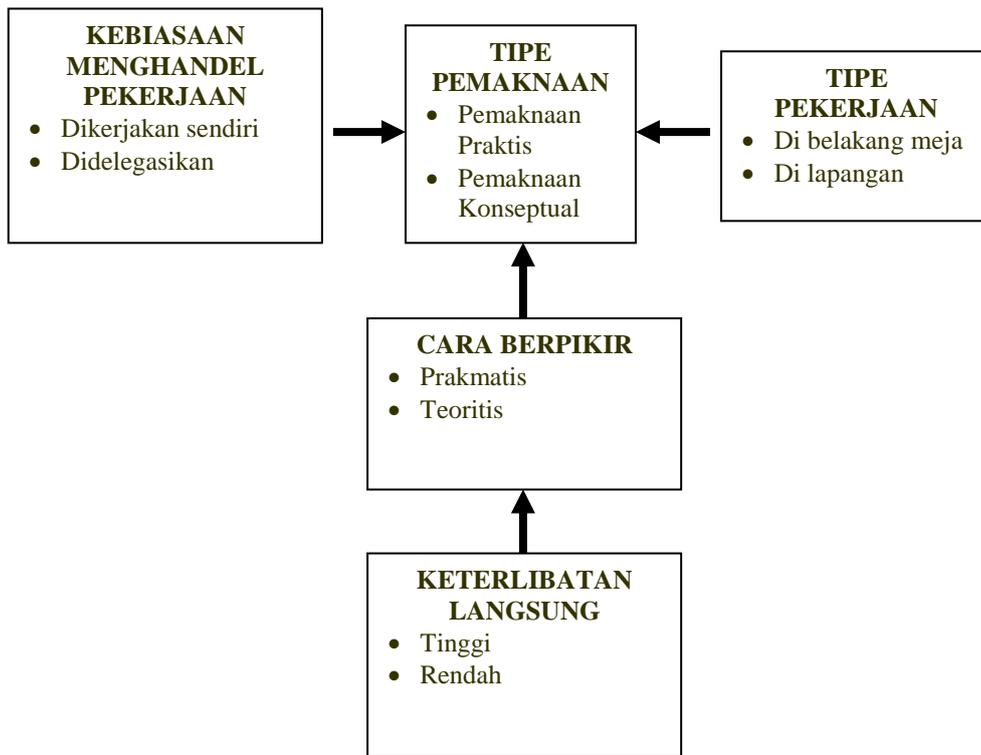
No	Informan	Tipe Pemaknaan	Deskripsi Makna Pemberdayaan Masyarakat
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan	Makna Praktis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggarap petani yang kurang skill, manajerial, modal, dan sebagainya</li> <li>• Pemberian ketrampilan dan kemam-puan manajerial dengan: kegiatan penyuluhan, pelatihan dan magang</li> <li>• Mengirim petani ke luar negeri</li> </ul>
2.	Kepala BIPP	Makna Konseptual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petani sebagai subyek</li> <li>• Menempatkan Petani sebagai pihak yang mampu melakukan &amp; mengatur sendiri usahatannya</li> <li>• Petani mampu merencanakan, melaksana-nakan, memenuhi dan mengelola kebutuhannya sendiri</li> </ul>
3.	Camat	Makna Konseptual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggerakkan msyarakat</li> <li>• Memberi wacana pada masyarakat: berpikir dari, oleh dan untuk mereka</li> <li>• Agar masyarakat berpikir untuk mengembangkan diri dan masyarakat sekitarnya</li> </ul>
4.	Kepala Desa	Makna Praktis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat masyarakat yang memiliki potensi menjadi berdaya</li> <li>• Memandirikannya dengan berbagai kegiatan</li> <li>• Kegiatan dikelola oleh masyarakat atau kelompok itu sendiri. Contoh: Kelompok tani jamur merang.</li> </ul>

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepala dinas melakukan pembinaan langsung kepada kelompok tani jamur merang dalam kegiatan pemberdayaan. Kepala dinas juga terlibat dalam persoalan-persoalan teknis di lapangan, baik itu terkait rencana pembiayaan yang diajukan oleh kelompok tani, pencarian lokasi untuk pendirian kumbung. Ia juga memberikan kontribusi pemikiran, kebutuhan apa yang diperlukan kelompok terkait dengan pendirian ataupun pengembangan rumah produksi jamur merang. Informan juga harus yakin bahwa kelompok yang dibinanya sampai benar-benar bisa jalan dan berproduksi dan bisa memasarkannya. Karena hal ini juga terkait dengan pertanggungjawabannya terhadap dana yang ia kucurkan.

Kebiasaan kepala dinas yang lebih banyak untuk terjun langsung ke lapangan dari pada sekedar duduk di belakang meja dan memerintahkan anak buahnya, nampaknya menjadi cara kerjanya sejak mulai informan menjabat kepala dinas hingga selama ini. Barangkali terpengaruh dengan cara kerjanya yang lebih banyak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan teknis di lapangan, berpengaruh dengan cara berpikirnya yang praktis juga. Sehingga dalam memberi makna pemberdayaan masyarakat pun juga cenderung bersifat praktis. Demikian juga kepala Desa Argorejo, karena tugas-tugas kepala desa juga lebih banyak bersifat teknis, sehingga dalam memberikan makna terhadap pemberdayaan masyarakat juga lebih bersifat praktis.

Lain halnya dengan posisi kepala BIPP dan Camat yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan teknis di lapangan. Secara kelembagaan BIPP nampak kurang mengetahui terhadap kegiatan pemberdayaan jamur merang di Argorejo yang secara teknis dibina oleh dinas pertanian. Bahkan dalam jajaran penyuluh di lapangan pun juga belum ada PPL yang membidangi komoditas jamur. Dalam organisasi kerjanya pun juga berjenjang, hal mana kepala BIPP tidak mengambil porsi untuk terjun langsung untuk melakukan penyuluhan di lapangan. Apa yang dilakukan petani jamur merang adalah berdasar pengalamannya selama ini ketika ia masih bekerja di perusahaan jamur merang. Demikian juga camat lebih merupakan jabatan administratif dan tidak terlibat secara langsung terkait dengan pemberdayaan masyarakat tani jamur merang. Terkait hal tersebut yang dimungkinkan adalah memberikan pemaknaan pemberdayaan cenderung bersifat konseptual. Lebih jelasnya bagaimana tipe pemaknaan pemberdayaan masyarakat oleh pejabat pemerintah dikonstruksi, diungkapkan gambar 1.1.

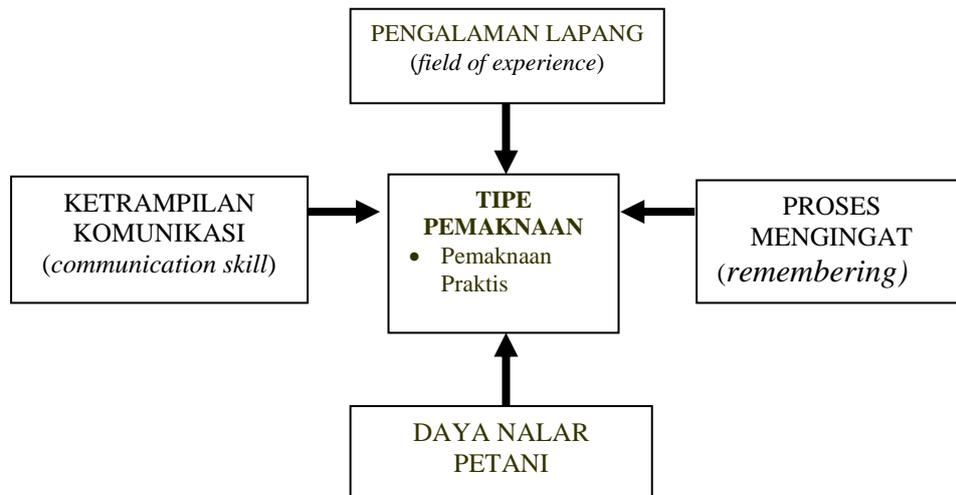
Sesungguhnya tidaklah menjadi masalah pemaknaan pemberdayaan masyarakat secara praktis yang diberikan selama tetap memiliki kesadaran yang penuh bagi informan yang bersangkutan ketika menjalankan tanggung jawabnya tidak lepas dari pemaknaan substansinya. Sehingga berbagai hal yang disarankan, dianjurkan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam konteks pemberdayaan masyarakat tetap tidak lepas dari makna yang sesungguhnya. Demikian juga pemaknaan konseptual juga tidak menjadi masalah ketika informan yang bersangkutan di dalam menjalankan tugasnya bisa memberi masukan-masukan, penjelasan/ saran konkrit yang secara teknis memungkinkan untuk bisa dilakukan. Pada gilirannya memberikan pemikiran-pemikiran yang bisa diterapkan oleh petani atau kelompok untuk lebih berkembang.



**Gambar 1.1. Konstruksi Pemaknaan Pemberdayaan Masyarakat oleh Pejabat Pemerintah**

Hal yang ingin disampaikan penulis bahwa penguasaan makna pemberdayaan masyarakat baik secara konseptual maupun secara praktis sebagai kesatuan pemahaman utuh, seyogyanya dimiliki setiap informan selaku pejabat yang berkompeten untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat kelompok tani jamur merang di Argorejo ini. Dengan demikian berbagai aktifitas praktis, teknis yang disarankan kepada petani jamur di lapangan tidak akan lepas dari roh pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Kesamaan persepsi dari pemerintah ini penting di dalam membangun persamaan persepsi tentang makna pemberdayaan masyarakat pada level petani.

Pada level petani pemaknaan tentang pemberdayaan masyarakat didasarkan pada pemikiran masing-masing petani yang lebih didasarkan pada pengalaman lapang (*field of experience*)-nya sendiri, tidak ada sosialisasi secara khusus dari pihak lain, termasuk dari pemerintah. Melalui ketrampilan berkomunikasi (*communication skill*) khususnya ketrampilan *decoding* terhadap sistem pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki masing-masing individu, dengan proses *remembering* dan di dukung oleh daya nalarnya, masing-masing petani memiliki proses memaknai terhadap konsep pemberdayaan masyarakat secara berbeda. Kelompok tani jamur merang Lestari Makmur yang dikelola dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat *tidak* dimulai dari proses paling awal, yakni sosialisasi konsep pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Lebih jelasnya bagaimana tipe pemaknaan praktis tentang pemberdayaan masyarakat dikonstruksi oleh petani, dapat diungkapkan dalam gambar 1.2.



**Gambar 1.2. Konstruksi Pemaknaan Praktis Pemberdayaan Masyarakat oleh Petani Jamur Merang**

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan kelompok tani jamur merang berangkat dari adanya individu yang cukup berdaya, namun dalam pelaksanaan kegiatannya belum bisa memberdayakan petani anggotanya seperti yang diharapkan. Peran pemerintah lebih bersifat langsung terkait dengan pendanaan dan pembinaan untuk teknis operasional dalam kegiatan produksi jamur merang. Belum menyentuh mengelola pranata-pranata/kelembagaan yang diperlukan agar mampu memberi penguatan individu untuk berkembang.

Bedasarkan hasil penelitian *proses memaknai* konsep pemberdayaan masyarakat yang dilakukan petani jamur bisa dibedakan antara petani yang *lancar* dalam proses memaknai pemberdayaan masyarakat dan petani yang *sulit* dalam proses memaknai pemberdayaan masyarakat. Posisi petani di dalam kelompok tani jamur merang tidak bisa dijadikan dasar lancar atau sulitnya dalam proses memaknai konsep pemberdayaan masyarakat. Sedangkan berdasarkan tipe pemaknaannya terhadap konsep pemberdayaan masyarakat yang diberikan petani jamur *semuanya* termasuk dalam kategori *pemaknaan praktis*. Berdasarkan proses pemaknaan, tipe pemaknaan, dan deskripsi pemaknaan pemberdayaan masyarakat petani bisa dilihat Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Proses Memaknai dan Tipe Pemaknaan Tentang Pemberdayaan Masyarakat Petani Jamur Merang di Desa Argorejo

Identitas Infor-man	Posisi dalam Kelompok	Proses Memaknai	Tipe Pemaknaan	Deskripsi Makna Pemberdayaan Masyarakat
1. Marjan	Ketua	Sulit Memaknai	Makna Praktis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identik dengan pembangunan dari aspek SDM</li> <li>• Muncul kegiatan dan muncul kendala-kendala</li> <li>• Memandang pemberdayaan sebagai proses yang terus menerus</li> <li>• Sasarannya pihak-pihak yang terkait: petani, jaringan pasar, pedagang/tengkulak</li> <li>• Merupakan tanggung jawab penyuluh untuk membina dan mendampingi kelompok tani (ketua kelompok)</li> </ul>
2. Suwit	Koordinator <i>Cluster</i> Polaman	Sulit Memaknai	Makna Praktis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agar masyarakat bisa bekerja, dapat upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari</li> <li>• Kehidupan lebih baik</li> <li>• Adanya Keberlanjutan usaha (<i>sustainability</i>)</li> <li>• Menyediakan tempat usaha</li> <li>• Merupakan tanggung jawab bersama: masyarakat sekitar, dan pemerintah memfasilitasi</li> <li>• Sasaran: masyarakat yg tidak punya pekerjaan tetap atau belum bekerja</li> <li>• Pihak yang memberdayakan: pemerintah dan tokoh masyarakat yang mau dan mampu</li> </ul>
3. Mujiman	Koordinator <i>Cluster</i> Kepuhan	Lancar Memaknai	Makna Praktis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggerakkan masyarakat menjadi tahu sesuai yang di harapkan suatu program</li> <li>• Lebih lanjut masyarakat tani bisa mengikuti anjuran hingga lebih baik &amp; berdaya hidupnya.</li> <li>• Contoh: pemberdayaan ke-lompok tani lele, pemberda-yaan kelompok tani pisang, dsb.</li> <li>• Yang bertanggung jawab: pemerintah (kepala desa dan perangkat) dan tokoh masya-rakat (ketua-ketua kelompok)</li> </ul>
4. Subandi	Anggota (pemetik jamur)	Sulit Memaknai	Makna Praktis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambah pola-pola kehidupan masyarakat/ memberi variasi mencari penghidupan</li> <li>• Menekankan peran individu sebagai pelaku usaha untuk bekerja secara benar untuk itu harus koreksi diri</li> <li>• Menekankan etos kerja yang tinggi (semangat, jujur dan kemauan bekerja) serta tanggungjawab terhadap peker-jaan</li> <li>• Perlu dukungan lingkungan sekitar, sehingga penting mem-perhatikan kondisi fisik dan sosial sekitar tempat usaha .</li> </ul>

Tabel 1.2. Proses Memaknai dan Tipe Pemaknaan Tentang Pemberdayaan Masyarakat Petani Jamur Merang di Desa Argorejo Lanjutan

5. Martoyo	Anggota	Sulit Memaknai	Makna Praktis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya mendapatkan pengalaman dan mendapat upah/ gaji</li> <li>• Ada harapan lebih maju, yang dulu tidak tahu apa-apa tetapi sekarang sudah tahu sedikit</li> <li>• Menekankan peran pemimpin (ketua kelompok) agar bisa lebih berkembang</li> </ul>
6. Sastro	Anggota	Sulit Memaknai	Makna Praktis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya agar masyarakat bisa bekerja</li> <li>• Agar masyarakat (keluarga) mendapat hasil dan lebih baik kehi-dupan keluarganya</li> <li>• Agar hidup tidak terlalu rendah dan bisa sejajar dengan ma-syarakat sekitarnya</li> <li>• Contoh: kelompok pengrajin emping, gerabah</li> <li>• Merupakan tanggung jawab bersama</li> <li>• Sasaran: untuk keluarga (saya dan anak saya) terutama kepala keluarga sebagai orang yang bertanggung jawab dalam keluarga</li> <li>• Pihak yang bisa terlibat untuk bertanggung jawab: pemerin-tah (kepala desa, perangkat desa, PPL) dan masyarakat sekitar</li> <li>• Masing2 pihak memiliki tanggung jawab beda</li> </ul>
7. Jefri	Anggota	Sulit Memaknai	Makna Praktis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak tahu menahu pemberdayaan masyarakat</li> <li>• Sasaran: untuk masyarakat yang belum punya pekerjaan (menganggur)</li> <li>• Tidak tahu siapa penanggung jawab penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat</li> <li>• Kontek rumah tangga tujuannya: perbaikan kehidupan masa depan RT (kehidupan ke depan anakanak, dimana bekerja, mencari pekerjaan, bagaimana dengan biaya sekolah).</li> </ul>
8. Mujiono	Anggota	Sulit Memaknai	Makna Praktis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya agar masyarakat tani lebih maju</li> <li>• Agar masyarakat lebih senang dan lebih baik</li> <li>• Berkemampuan dalam bertani yang akhirnya agar ekonominya mapan dan berfungsi sosial</li> <li>• Yang bertanggung jawab: masyarakat yang mampu dan pemerintah (kepala desa dan dinas)</li> <li>• Sasaran: untuk kita semua (diri kita, orang lain dan masyarakat sekitar)</li> <li>• Sistem pemberdayaan: secara berkelompok agar tujuan ber-sama lebih mudah dicapai dan memiliki <i>bargaining position</i></li> </ul>

Pemaknaan praktis merupakan pemaknaan yang dkonstruksi pada pemikiran pragmatis apa yang terjadi atau apa yang sebaiknya terjadi di lapangan. Pemaknaan praktis yang dimaksud adalah pemaknaan informan yang deskripsinya cenderung/ mengarah pada hal-hal yang sifatnya praktis (aktifitas, kegiatan, di lapangan). Sementara pemaknaan konseptual

adalah pemaknaan informan yang didasarkan pada pemikiran lebih teoritis, mendalam dan lebih berpikir substansi. Pemaknaan konseptual mengenai apa yang semestinya dilakukan didasarkan pengetahuan / teori.

Ditemukan 6 informan yang dikategorikan memiliki kemampuan berpikir yang baik untuk mengembangkan penalarannya dalam memahami konsep pemberdayaan masyarakat. Petani jamur merang yang dimaksud adalah Marjan, Suwit, Mujiman, Bandi, Sastro dan Mujiono. Ada variasi diantara petani tersebut dalam memaknai pemberdayaan masyarakat. Ada pemikiran yang cukup maju dari 2 informan. Pertama, pemberdayaan dimaknai sebagai proses yang terus menerus. Pemberdayaan masyarakat memunculkan kegiatan yang akhirnya memunculkan masalah. Masalah tersebut dicoba diatasi dan ditemukan solusi sehingga proses selanjutnya akan lebih baik. Demikian pula kegiatan yang baru pun akan muncul masalah baru, dan seterusnya. Sehingga kegiatan pemberdayaan menuju ke arah kemajuan. Kedua, ada informan yang secara eksplisit menyatakan bahwa dalam pemberdayaan penting adanya keberlanjutan (*sustainability*).

Ada 2 informan (Martoyo dan Jefri) yang memiliki *kemampuan berpikir yang kurang baik* untuk mengembangkan penalarannya dalam memahami konsep pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan Martoyo di usahatani jamur dimaknai sebagai kegiatan mendapat pengalaman dan upah. Infoman ini sulit untuk memberikan penjelasan secara panjang lebar tentang pemberdayaan masyarakat. Sementara Jefri memiliki kondisi paling susah dimintai penjelasan. Ia menyatakan tidak tahu tentang makna pemberdayaan, walaupun peneliti telah mengupayakan berbagai cara untuk membantunya. Berdasarkan pencermatan peneliti atas jawaban informan baik secara verbal maupun non verbalnya menunjukkan bahwa ia tipe orang yang fokus pada pekerjaan yang dibebankan kepadanya dan pada keluarganya. Ia kurang peduli dengan berbagai permasalahan, pengetahuan di sekelilingnya yang tidak berkaitan dengan pekerjaan dan keluarganya

Tipe pemaknaan yang diberikan petani jamur, yakni semua termasuk dalam kategori *tipe pemaknaan praktis*. Pemaknaan yang didasarkan pada pemikiran pragmatis yang ada di lapangan, tidak didasarkan pada pemikiran yang lebih filosofis, substansial dari konsep pemberdayaan. Berdasarkan penelusuran berbagai sumber bukti seperti wawancara, pengamatan, ataupun pengamatan berperan serta terhadap semua informan tidak diketemukan gejala pemahaman konsep pemberdayaan masyarakat ke arah pemahaman yang mendasar (pemaknaan konseptual). Hakekat pemberdayaan masyarakat belum dimiliki informan dalam mengelola usahatani jamur. Pemaknaan pemberdayaan direduksi menjadi sederhana yakni agar proses produksi jamur menjadi lancar dan memberikan produksi yang tinggi dan memberikan pendapatan lebih baik.

Tidak diperoleh pemahaman konsep pemberdayaan dari sumber semestinya. Petani (termasuk ketua) memaknainya sesuai dengan daya nalar dengan latar belakang masing-masing. Kondisi menjadi kurang menguntungkan di level pemerintah dalam pembinaan juga memahami pemberdayaan secara parsial. Pembinaan tidak dimulai dari paling awal, yakni pemahaman konsep pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan di lapangan tercerabut dari makna sebenarnya.

Apabila dicermati lebih lanjut kebanyakan informan (6 orang) yang dalam proses memaknai konsep pemberdayaan masyarakat termasuk dalam kategori *sulit memaknai*. Dalam memaknai konsep pemberdayaan, penulis harus menuntunnya dengan berbagai cara dalam kerangka membuka sistem pengetahuan dan sistem memori informan dan mengembangkan daya nalarnya sehingga bisa memberi penjelasan-penjelasan yang lebih baik.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberdayaan masyarakat tani belum dimaknai secara benar baik oleh pemerintah maupun masyarakat tani yang tergabung dalam kelompok tani jamur merang Lestari Makmur. Pemberdayaan masyarakat tani di lapangan dimaknai secara parsial dan tercerabut dari makna yang sesungguhnya. Hal ini berdampak pada bagaimana mereka melakukan kegiatannya di lapangan, berbagai kegiatan kelompok mereka lakukan sesuai dengan pemahamannya tentang pemberdayaan masyarakat.

Sebagai saran perlu sosialisasi tentang makna pemberdayaan masyarakat tani baik pada level pemerintah dan petani agar terjadi persamaan persepsi dalam penyelenggaraan kegiatannya. Dengan demikian kegiatan kelompok mengacu pada pemahaman pemberdayaan masyarakat tani yang benar, dengan tetap memperhatikan permasalahan di lapangannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2003. *Undang-Undang Otonomi Daerah (UU No 22, 25 dan 28 tahun 1999)*. Bandung: Citra Umbara.
- Anonim, 2007. *Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: Fokusmedia.
- Bormann, EG. 1990. *Small Group Communication Theory and Practice, Third Edition*. New York: Harper & Row Publishers.
- Bungin, B.. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, JW.2002.*Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta: KIK Press.
- Dipertahut, 2008. *Materi Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Bantul Desember 2008, Pemda Bantul*, Yogyakarta: Tidak Diterbitkan.
- Eko,S..2004.*Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat,Edisi 1*.Yogyakarta:APMD Press.
- Griffin, EM 2006. *A First Look At Communication Theory, International Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Hikmat, H. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Edisi Revisi*. Bandung: Humaniora Utama.
- Indardi, 2010. *Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Universitas Padjadjaran (UNPAD PRESS), Bandung.
- Kaho, JR. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.

- Kurnia, G. 2004. "*Petani*" *Pejuang yang Terpinggirkan*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Sosiologi Petanian pada Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Bandung: UNPAD.
- Muhajir, N. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi IV*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyana, D; Solatun. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prawirokusumo, S. 2001. *Ekonomi rakyat: Konsep, Kebijakan, dan Strategi*. Yogyakarta:BPFE.
- Usman, S, 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setda, 2007. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Bantul*. Pemda Bantul, Yogyakarta: Tidak Diterbitkan.
- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhendra, 2005. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. 2007. *Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sunarto, K. 2004. *Pengantar Sosiologi, Edisi Revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suparjan; Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat, dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Weber, M. 2006. *Sosiologi*. Terjemahan Noorkholis dan Team Penrtjemah Promothea. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- West R; Lynn H Turner. 2007. *Introducing Communication Theory Analysis and Application Third Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Yin, RK. 2005. *Studi Kasus, Desain dan Metode, Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.